

SKRIPSI MINOR

ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Menyelesaikan Tugas-
Tugas Akademik dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



NURSYAMSINAR

NIM: 00774000291

**JURUSAN AKUNTANSI D3
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2010**

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN(PKBL) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V

Oleh : NURSYAMSINAR

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di jalan Rambutan Nomor 43 Pekanbaru. Penelitian ini berfokus kepada sistem yang diterapkan perusahaan tersebut khususnya pada bagian PKBLnya dalam memberikan pinjaman kepada mitra binaannya yang berasal dari koprasi, pengusaha kecil dan menengah. Dengan melihat bagaimana sistem atau prosedur yang diterapkan perusahaan tersebut dalam memberikan pinjaman, maka penelitian ini ditekankan kepada bagaimana prosedur yang diterapkan perusahaan itu dalam memberikan bantuan pinjaman modal kejadian khusus kepada mitra binaannya. Adapun yang menjadi perumusan masalahnya adalah apakah sistem pemberian pinjaman yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V khususnya di bagian PKBL telah terlaksana secara efektif dan efisien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek sistem pemberian pinjaman kepada mitra binaan oleh bagian PKBL di PT. Perkebunan Nusantara V dan untuk mengetahui apakah pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan oleh bagian PKBL(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) di PT. Perkebunan Nusantara V dilakukan sesuai dengan prosedur. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam memperbaiki sistem yang diterapkan dalam memberikan pinjaman dana kepada mitra binaan agar lebih baik lagi kedepannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data adalah dengan cara mengambil data di PT. Perkebunan Nusantara V. Ditambah dengan sedikit melakukan wawancara dengan karyawan yang menangani pemberian pinjaman dana di PT. Perkebunan Nusantara V.

Dari penelitian ini maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pemberian pinjaman yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V sudah cukup baik dan sesuai dengan teori yang selama ini banyak diterapkan dan digunakan oleh perbankan, namun masih ada yang belum diterapkan, yaitu analisis 7 P dalam menganalisis pemberian pinjaman.

Kata kunci: sistem pemberian pinjaman dana kemitraan PTPN V

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan	9
B. Struktur Organisasi Perusahaan	17
C. Sejarah Singkat PKBL PTPN V.....	24
1. Kegiatan Utama	26
2. Susunan Pengurus.....	31
3. Dasar Penyajian Laporan Keuangan.....	32
 BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	
1. Pengertian Usaha Kecil.....	33

2. Pengertian Sistem.....	34
3. Pengertian Kredit.....	35
4. Unsur-unsur Kredit.....	36
5. Tujuan Kredit.....	39
6. Fungsi Kredit.....	42
7. Jenis-jenis Kredit.....	44
8. Jaminan Kredit.....	48
9. Prosedur Pemberian Kredit.....	50
10. Analisis Kredit.....	54
B. Tinjauan Praktek	
1. Jenis Pinjaman Dana.....	58
2. Prosedur dan Persyaratan Pemberian pinjaman	60
3. Analisis Pinjaman.....	63
4. Pinjaman Bermasalah.....	66
5. Pinjaman Dalam Pandangan Islam.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita tahu bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang semata-mata menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan disertai pendapatan bunga. Tetapi dunia perbankan juga memberikan fasilitas lainnya yaitu dalam hal pemberian dan penyaluran kredit, guna membantu para pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Masalah perkreditan ini bagi pihak perbankan tidak bisa dianggap mudah dan perlu mendapat perhatian khusus, karena dalam pelaksanaannya berbagai masalah akan timbul seperti bagaimana cara pemberian kredit, tujuan dari pemberian kredit, besarnya jumlah kredit, jangka waktu kredit, serta pengaruhnya bagi masyarakat.

Pada masa krisis ekonomi, kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami pasang surut. Terutama pada sektor perbankan dan industri berkala besar yang tergantung pada impor serta terganggunya kegiatan industri, distribusi, dan konsumsi. Kondisi ini membawa dampak buruk karena meningkatnya angka pengangguran, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari badai krisis, salah satunya melalui pembangunan ekonomi dan perbankan. Kebijakan ini dilakukan karena peran perbankan sangat besar dalam menghimpun dana masyarakat

terutama yang menyangkut masalah peredaran uang, pemberian dan penyaluran kredit serta pengalokasian investasi yang tepat guna.

Sejalan dengan itu masih ada lembaga lainnya yaitu melalui program BUMN khususnya di bagian PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) dan BL (Bina Lingkungan) yang dapat menyalurkan pinjaman dana bagi koprasi dan usaha kecil dan menengah.

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan salah satu Perusahaan BUMN Perkebunan dengan komoditi andalan kelapa sawit dan komoditi kedua yaitu karet. Perusahaan ini juga menyalurkan pinjaman usaha kecil, yang di tangani khusus di bagian PUKK dan BL. Tujuan PUKK dan BL yang disingkat menjadi PKBL ini adalah:

1. Mewujudkan ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dengan program hibah melalui pendidikan, pelatihan dan lain lain.
3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat ,pemerintah daerah setempat (Dinas Koperasi & UKM), dengan PT. Perkebunan Nusantara V
4. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi dengan mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat.
5. Pemerataan pembangunan dan perluasan lapangan kerja
6. Memberikan modal kerja bagi Mitra binaan
7. Meningkatkan taraf hidup Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

8. Meningkatkan kemampuan Mitra binaan menjadi tangguh dan mandiri

Pinjaman usaha kecil ini akan membantu sektor usaha kecil. Kriteria pinjaman usaha kecil ini dapat berupa pinjaman khusus maupun pinjaman modal kerja.

Pengembangan usaha kecil dalam prakteknya memiliki perbedaan dengan usaha besar karena usahanya yang relatif kecil dan daerah pemasarannya yang relatif terbatas.

Usaha kecil dan menengah merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, maka perlu dilakukan pembinaan dan bantuan pada usaha kecil dan menengah tersebut. Maka sebagai salah satu langkah kebijaksanaan, pemerintah lebih memusatkan perhatiannya pada pembinaan dan pengembangan sektor swasta dalam ukuran usaha kecil dan menengah, dan diupayakan peningkatan prakarsa, etos kerja, dan peranan disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa hasilnya tidak sekedar meningkatkan pendapatan perkapita tapi juga menjangkau perkembangan dan penyerapan perubahan pada struktur masyarakat sekaligus menjembatani kesenjangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar.

Sebagai langkah kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. : 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK

(Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL). Berdasarkan peraturan tersebut dana program kemitraan bersumber dari:

- a. Penyisihan laba setelah pajak 1-2 % maksimal 2%
- b. Jasa administrasi pinjaman, marjin atau bagi hasil, bunga deposito atau jasa giro dan program kemitraan setelah dikurangi pajak.
- c. Pelimpahan dana program kemitraan BUMN lain jika ada.

Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah tanggung jawab terpenting adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberian pinjaman yang sehat. Dilihat dari kenyataan yang ada, didalam melakukan pemberian pinjaman berbagai masalah yang timbul adalah terjadinya kemacetan pengembalian pinjaman serta jangka waktu yang tidak sesuai dengan pelunasan pinjaman itu bisa saja tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terjadilah pengembalian pinjaman macet.

Oleh karena itu perlu adanya suatu sistem atau prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko dari pemberian pinjaman itu sendiri. Pemberian fasilitas pinjaman ini bertujuan untuk membantu para pengusaha untuk meningkatkan aktifitas perusahaannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

PT. Perkebunan Nusantara V khususnya bagian PUKK, tempat penulis melakukan penelitian merupakan salah satu wadah yang berperan dalam pemberian pinjaman pada usaha kecil dari laba perusahaan sebesar 1-2%. Dalam melakukan pemberian pinjaman berbagai masalah yang timbul adalah terjadinya kemacetan pengembalian pinjaman dengan jumlah besar, maka pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terjadilah pengembalian pinjaman macet.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peninjauan langsung tentang permasalahan bagaimana sistem pemberian pinjaman dana kepada mitra binaan yang diterapkan oleh bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara V dan menyajikan Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PTPN V”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah sistem pemberian pinjaman dana kepada mitra binaan oleh bagian PKBL di PTPN V telah terlaksana secara efektif dan efisien?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana praktek sistem pemberian pinjaman dana kepada mitra binaan oleh bagian PKBL di PT. Perkebunan Nusantara V.
 - 2) Untuk mengetahui apakah pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan oleh bagian PKBL di PT. Perkebunan Nusantara V dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Manfaat penelitian adalah:
 1. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan oleh perusahaan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penyaluran pinjaman modal untuk masa yang akan datang.
 2. Bagi penulis sebagai wadah penerapan ilmu selama memperoleh pendidikan dan menambah wawasan mengenai sistem pemberian pinjaman dana.
 3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang akan mengadakan penelitian lebih jauh lagi.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan berlokasi di PT. Perkebunan Nusantara V yang berada di jalan Rambutan no. 43 yang merupakan perusahaan BUMN yang pada bagian PKBLnya melakukan pembinaan pada usaha kecil di daerah

Riau. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah 2 bulan dimulai dari bulan april hingga bulan mei 2010.

2. Metode Praktek

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu langsung kelapangan dan melakukan pengamatan serta wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan judul Laporan Akhir ini.

3. Metode Pengambilan Data

Data yang diperoleh selama penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan mengadakan tanya jawab dengan beberapa karyawan bagian PKBL. Dan data sekunder didapat dari data bagian PKBL atau sumber-sumber yang mendukung dalam pelaksanaan laporan ini.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan mengenai pembahasan ini dibagi atas empat bab yang beraturan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. Perkebunan Nusantara V khususnya bagian PKBL yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktifitas di dalam perusahaan tersebut.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang teoritis praktik yang berhubungan dengan konsep sistem pemberian pinjaman kepada mitra binaan oleh bagian PKBL. Sebagai kerangka acuannya dalam pembahasan dan selanjutnya uraian tentang pengertian usaha kecil, pengertian sistem, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, prosedur pemberian kredit, dan analisis kredit.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara V terletak di kawasan jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru. PT. Perkebunan Nusantara V (Persero). Menurut sejarah Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN Perkebunan yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil dari konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, PTP V di Provinsi Riau yang mengelola budidaya sawit, karet, kakao dan sejak tahun 2001 hanya berkonsentrasi pada budidaya sawit dan karet. Dan secara efektif mulai beroperasi pada tanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat di Pekanbaru.

Landasan hukum Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang “Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara V”. Anggaran Dasar Perusahaan di buat di depan Notaris Harun Kamil, SH Melalui Akte No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C28333.HT.01.01 Tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996, serta telah di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan , terakhir dengan Akte Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01/2002 tanggal 1 Oktober 2002, dan telah di umumkan dalam Berita

Negara RI Nomor 75 tanggal 19 September 2003 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8785/2003.

Modal Perusahaan di tetapkan dengan surat Keputusan Mentri Keuangan No. 191/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996. Saat ini kantor pusat Perusahaan yang berada di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai kabupaten di Pekanbaru.

Maksud dan tujuan didirikannya PT. Perkebunan Nusantara V adalah “ ikut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan di bidang sub sektor pertanian khususnya, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.”

PT. Perkebunan Nusantara V mempunyai visi dan misi perusahaan yang mana visi dan misi perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Visi PT. Perkebunan Nusantara V adalah “menjadi perusahaan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global.”

Sedangkan misi perusahaan tersebut adalah “mengelola agro industri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan *stakeholder*, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya dan teknologi.”

Selain itu, Perusahaan tersebut juga mempunyai lambang atau logo perusahaan yang memiliki makna tersendiri bagi perusahaan. Makna dari lambang Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Gambar tiga helai daun kecambah merupakan bentuk PT. Perkebunan Nusantara V sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV dan PTP V yang terletak di Provinsi Riau.
- b. Warna kuning pada daun kecambah melambangkan hasil produksi PT. Perkebunan Nusantara V, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO).
- c. Lima akar kecambah kelapa sawit melambangkan PT. Perkebunan Nusantara V yang baru tumbuh dan akan terus berkembang.
- d. Lingkaran yang bertuliskan Perkebunan Nusantara V menggambarkan kesatuan dan persatuan yang menyeluruh.
- e. Warna hijau pada lingkaran tersebut menggambarkan ruang lingkup usaha perusahaan, yaitu dibidang pertanian atau perkebunan.

Secara efektif, Perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 9 April 1996 dengan dilantiknya Direksi dan Dewan Komisaris secara lengkap oleh Menteri Pertanian RI. Adapun Kantor Pusat Perusahaan ini terletak di jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan Kantor Perwakilan di jalan Minangkabau No. 48 Jakarta Selatan.

Perusahaan telah mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet serta mengolah hasilnya menjadi minyak sawit atau *Crude Palm Oil (CPO)*, inti sawit atau *Palm Kernel (PK)* dan berbagai jenis produk karet. Semua hasil produksi dijual kepasar lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran, Perusahaan bersama seluruh BUMN Perkebunan membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV yang berada di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Medan.

Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 13 November 2003 yang ditandai dengan terbitnya Obligasi Perusahaan berupa Obligasi Seri A dan Seri B sejumlah Rp 300.000.000.000 kepada Publik dengan peringkat obligasi *idA (Single A; Stable Outlook)*, yaitu:

“Perusahaan dengan peringkat *idA* memiliki dukungan kemampuan yang kuat di banding obligor lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.”

Setiap tahunnya peringkat obligasi ini dievaluasi oleh peringkat efek independen, dan pada bulan November 2008 peringkat obligasi Perusahaan kembali mendapat rating *idA (Single A; Stable Outlook)* sebagaimana rating tahun-tahun sebelumnya.

Hingga tahun 2008, Perusahaan mengelola 52 Unit Kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat, 6 *Strategic Business Unit (SBU)*, 25 Kebun Inti atau Plasma, 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 1 unit Pabrik PKO, 4 unit Pabrik Karet dan 3 unit Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh Perusahaan seluas 83.981 Ha dan

Kebun Plasma seluas 74.526 Ha. Perusahaan bermitra usaha dengan petani plasma dengan melakukan pembelian hasil produksi Kebun Plasma berupa TBS dan Karet dari areal seluas 74.526 Ha.

Untuk mengelola komoditi kelapa sawit, Perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 565 ton TBS perjam dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti kelapa sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik *Palm Kernel Oil* dengan kapasitas terpasang sebesar 300 ton inti sawit per hari dengan hasil olahan berupa *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM).

Sedangkan untuk mengolah komoditi karet, perusahaan memiliki 4 unit Pabrik Karet yang terdiri dari 2 fasilitas Pengolahan Karet Remah (*Crumb Rubber*) dan 2 fasilitas Pengolahan Karet Asap (*Ribbed Smoked Sheet/RSS*) dengan kapasitas olah terpasang sebesar 72,5 ton Karet Kering per hari. Jenis produk karet yang dihasilkan antara lain RSS I, RSS II, RSS III, RSS IV, SIR 10 dan SIR 20. Perusahaan juga mengembangkan produksi lateks pekat melalui perusahaan joint venture PT. Mardec Nusa Riau, yang merupakan patungan Perusahaan dengan Mardec International Sdn. Bhd. – Malaysia dan PT. Banihuma – Jakarta. Bahan baku lateks pekat tersebut sepenuhnya di pasok oleh Perusahaan.

Sumber daya perusahaan yang dimiliki perusahaan pada Triwulan I/2009 berjumlah 15.658 orang yang bekerja di seluruh organisasi perusahaan. Perusahaan yang telah dinasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun

1957 menjadi Perkebunan Negara (PPN) ini memiliki beberapa unit usaha antara lain:

Unit Usaha (Kebunatau Unit) yang dikelola oleh Perusahaan sebagai berikut:

	<u>Triwulan II (2009)</u>	<u>Tahun 2008</u>
1. Kantor Pusat	1 Unit	1 Unit
2. <i>Strategic Business Unit (SBU)</i>	6 Unit	6 Unit
3. Kebun Inti +Kebun Plasma	25 Unit	25 Unit
4. Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	12 Unit	12 Unit
5. Pabrik PKO	1 Unit	1 Unit
6. Pabrik Karet	4 Unit	4 Unit
7. Rumah Sakit	<u>3 Unit</u>	<u>3 Unit</u>
JUMLAH	52 Unit	52 Unit

Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara V

Kantor Pusat terdiri dari 2 Biro dan 12 Bagian. Termasuk didalam manajemen Kantor Pusat adalah:

- a) Kantor Penghubung (LO) Jakarta yang berda di bawah Biro Corporate Sekretari.
- b) Instalasi Tangki Minyak Sawit (ITMS) yang berada dibawah Bagian Komersil.

Unit Organisasi yang ada di Kantor Pusat Perusahaan adalah sebagai berikut:

Table 1.1

No.	TRIWULAN III/2009	TAHUN 2008	KETERANGAN
1	Biro SF	Biro SF	Tetap
2	Biro Corporate Secretary (CS)	Biro Corporate Secretary (CS)	Tetap
3	Bagian Perencanaan, Pengkajian dan Teknologi Informasi	Bagian Perencanaan, Pengkajian dan Teknologi Informasi	Tetap
4	Bagian Tanaman	Bagian Tanaman	Tetap
5	Bagian Teknik	Bagian Teknik	Tetap
6	Bagian Pengolahan	Bagian Pengolahan	Tetap
7	Bagian Akuntansi	Bagian Akuntansi	Tetap
8	Bagian Pembelian	Bagian Pembelian	Tetap
9	Bagian Pemasaran	Bagian Pemasaran	Tetap
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tetap
11	Bagian SCM	Bagian SCM	Tetap
12	Bagian Umum	Bagian Umum	Tetap
13	Bagian Pengembangan Kebun	Bagian Kemitraan dan Pengembangan	Berubah
14	Bagian PLUK & BL	Bagian PLUK & BL	Tetap

Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara V

Strategic Business Unit (SBU) dipimpin oleh seorang General Manager sebanyak 6 unit SBU, yang terdiri dari 58 unit SBU yang membawahi 25 unit Kebun Sendiri atau Inti dan Plasma, 12 Unit PKS. 4 unit Pabrik Karet, 1 unit Pabrik PKO, serta 1 unit SBU Jasa Kesehatan yang membawahi 3 unit Rumah Sakit.

Dari 25 unit Kebun Sendiri atau Inti D dan Plasma di atas tidak termasuk Proyek Pengembangan Kebun Kelapa Sawit milik Pemkab Siak sebanyak 2 unit, yaitu Proyek Kebun Siak I dan Proyek Kebun Siak II yang merupakan unit-unit di

luar SBU (Non SBU) yang dikelola oleh Perusahaan dan dikoordinir oleh Bagian Kemitraan dan Pengembangan Kebun (KPK) di Kantor Pusat, Kebun Plasma yang dikelola oleh Perusahaan berasal dari PIR (NES) II Berbantuan, PIR ADB, PIR Khusus, PIR Lokal dan PIR Trans. Lahan Perkebunan plasma tersebut dikelola dalam unit SBU Plasma.

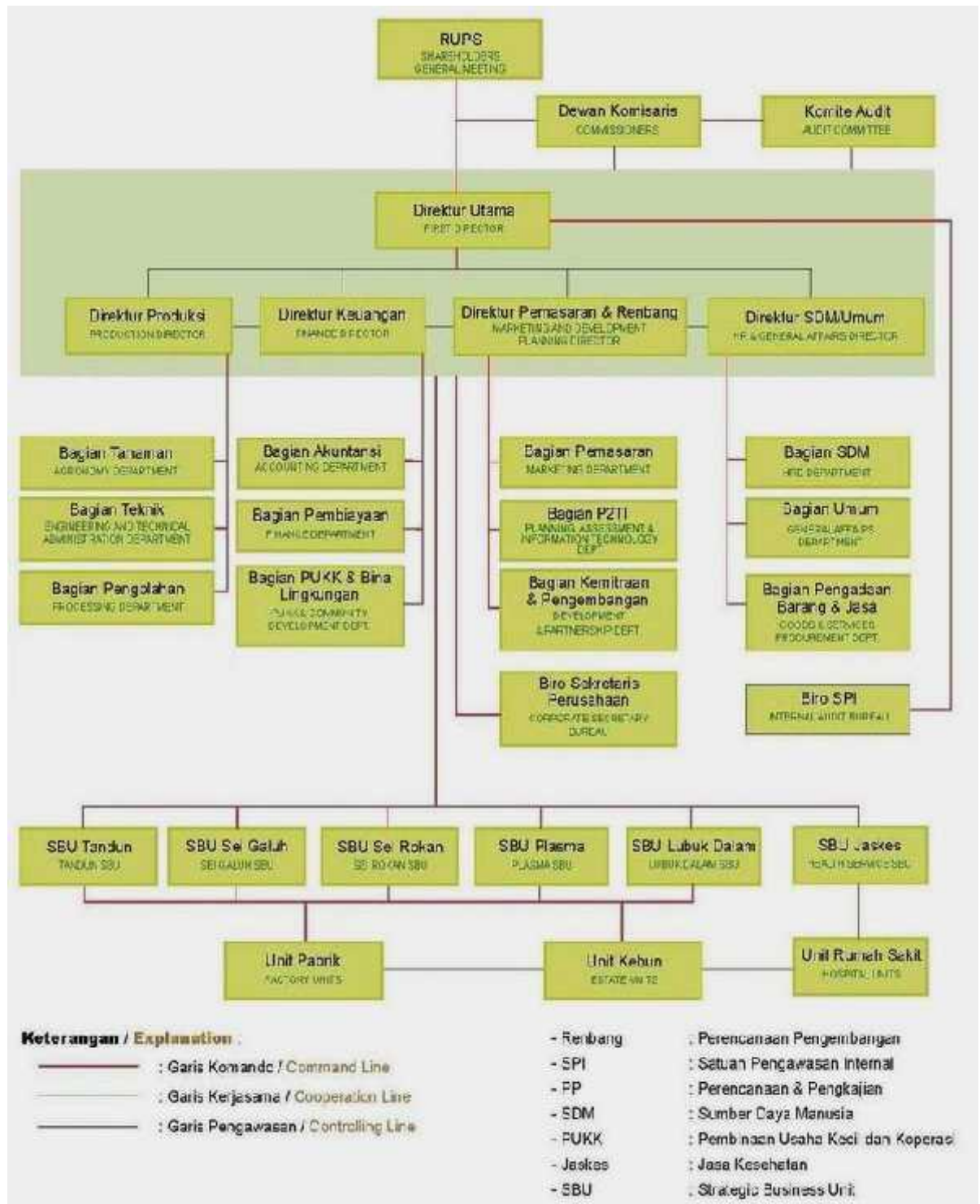
Dari 12 Pabrik Kelapa Sawit, 3 unit di antaranya tergabung dalam manajemen unit kebun, sedangkan sisanya sebanyak 9 unit merupakan unit tersendiri. Dalam 12 unit PKS tersebut tidak termasuk 1 unit PKS di Air Molek yang sampai sekarang masih dalam proses pembangunan. Selain itu terdapat 2 unit Pabrik Kompos yang tergabung dalam manajemen PKS Terantam dan PKS Sei Rokan.

Dari 4 unit pabrik karet, 3 unit diantaranya tergabung dalam manajemen unit kebun, sedangkan 1 unit merupakan unit tersendiri.

Dari uraian ringkasan di atas jelaslah sudah dapat di ketahui asal mula berdirinya PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) yang berkantor pusat di jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru.

B. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru

Gambar 1.1



Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara V

Bagian atau Unit PT. Perkebunan Nusantara V adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berfungsi sebagai pengambil keputusan tertinggi dan pusat pengawasan terhadap jalannya kegiatan perusahaan. Dalam hal ini dikuasakan oleh Menteri BUMN.

Pemegang Saham Perusahaan adalah Pemerintah Indonesia, dalam hal ini di berikan kuasa kepada Menteri BUMN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1998 tentang “Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara”. Maka sejak tahun 1998 Pemegang Saham yang semula adalah Menteri Keuangan beralih kepada Menneg BUMN dan sekarang adalah Menteri BUMN.

2. Dewan Komisaris

Sebagai badan pengawas yang bertugas untuk kepentingan pemegang saham, mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi dan pengolahan dilaksanakan oleh para Direksi.

Susunan Komisaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku kuasa pemegang saham perusahaan Nomor Kep 185/M-MBU/2008 tanggal 24 September tentang “Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V” sebagai berikut:

Komisaris Utama : Maruli Gultom

Komisaris : Syarwan Hamid
Komisaris : Yusni Emilia Harahap
Komisaris : Gamal Nasir
Komisaris : Morgan Shyarif Lumban Batu

3. Direktur Utama

Fungsinya adalah :

- a. Menetapkan kebijakan strategis perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RPJ), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Operasional (RKO).
- b. Merencanakan, membina, dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi organisasi sesuai dengan kebutuhan.
- c. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengawasan untuk pengamanan perusahaan.
- e. Bertindak sebagai pimpinan umum perusahaan, mengkoordinir kegiatan anggota direksi dalam mengendalikan kegiatan operasional perusahaan.
- f. Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil usaha perusahaan yang merupakan neraca dan rugi laba.

4. Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbag, SDM dan Umum

Bagian-bagian tersebut mempunyai wewenang yang sama, yaitu :

- a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis dan operasional sesuai dengan rencana untuk pencapaian sasaran kinerja dan tujuan perusahaan.
- b. Menyiapkan, menyusun, dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan dan kepentingan perusahaan.
- c. Membina dan mengembangkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan sumber daya manusia.
- d. Menyiapkan dan menyajikan laporan kemajuan atau hasil kerja untuk laporan direksi kepada pemegang saham, dewan komisaris maupun instansi terkait lainnya.
- e. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran yang disediakan direktorat serta menindak lanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kepentingan perusahaan.

5. Kepala Bagian

Mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan strategi perusahaan dibidang Satuan Pengawasan Intern untuk jangka panjang waktu lima tahun (RPJ 5 tahun) serta menyusun lebih rinci RJP 5 tahun tersebut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya.
- b. Mengidentifikasi seluruh aspek kegiatan perusahaan, kemudian berdasarkan data yang terkait melakukan analisis untuk menentukan kemungkinan terjadinya ketidakefisiensian, penyimpangan dan

ketidakwajaran. Berdasarkan hak tersebut ditentukan prioritas kemungkinan yang harus diwaspadai.

- c. Menyusun prosedur kerja dan kebijakan di lingkungan.

Susunan Direksi Perusahaan ditetapkan surat keputusan menteri Negara BUMN selaku pemegang saham perusahaan Nomor Kep-144/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006 dan Kep-38/MBU/2007 tanggal 4 April 2007, dengan susunan Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama : Irwan Juned
Direktur Produksi : Suharjoko
Direktur Keuangan : Erwan Pelawi

Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku kuasa pemegang saham Perusahaan Nomor Kep-43/MBU/2009 tanggal 4 Maret 2009 terjadi perubahan susunan Direksi sebagai berikut:

	<u>Baru</u>	<u>Lama</u>
Direktur Utama	: Fauzi Yusuf	: Irwan Juned
Direktur Produksi	: Suharjoko	: Suharjoko
Direktur Keuangan	: Erwan Pelawi	: Erwan Pelawi
Direktur Pemasaran dan Perencanaan atau Pengembangan	: Bambang Listijono	: Bambang Listijono
Direktur SDM atau Umum	: Djoko Muljono	: Djoko Muljono

6. Kepala Urusan

Tugasnya antara lain :

- a. Membuat kajian tentang perusahaan.
- b. Membuat evaluasi dan uji kelayakan.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada perusahaan melalui kepala bagian.
- d. Bekerja sama dengan Kepala Bagian untuk melakukan evaluasi terhadap perencangan dan pengembangan.
- e. Menerima tugas-tugas dengan segala kebijakan pelaksanaannya dari Kepala Bagian dan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada Kepala Bagian.
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian atau Kebun.

7. Asisten

Memiliki tugas diantaranya adalah :

- a. Menilai prestasi kerja karyawan bawahannya dan mengajukan penilaian karyawan tersebut kepada Kepala Bagian
- b. Memeriksa laporan hasil produksi
- c. Menerima tugas-tugas dengan segala kebijakan pelaksanaannya dari Kepala Urusan dan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Bagian.

8. Komite Audit

Guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komisaris, terutama fungsi pengawasan. Komisaris telah membentuk Komite Audit yang dipimpin oleh salah satu anggota Komisaris. Pembentukan organ tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisaris Perusahaan Perseroan

(Persero) PT. Perkebunan Nusantara V Nomor 1-SK/DK/VI/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Komisaris Perusahaan telah memberhentikan dengan hormat anggota Komite Audit periode 2007-2008 dan mengangkat anggota Komite Audit periode 2008-2009 terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2008 s.d. 2 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

Ketua : Morgan Shyarif Lumban Batu

Anggota : Dr. Gusnardi, Drs, SE, M.Si, AK

Anggota : Drs. Al- Azhar A, AK

9. Aktivitas Perusahaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, PT. Perkebunan Nusantara V merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri atau perkebunan. Komoditas andalan perusahaan ini adalah kelapa sawit dan karet. Perusahaan mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet untuk menghasilkan minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) yang diproduksi melalui proses pengolahan di dua belas PKS yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menghasilkan Inti Sawit yang diperoleh dari pemisahan daging buah selama proses pengolahan berlangsung. Sedangkan untuk Produk Karet, perusahaan mempunyai dua fasilitas Pengolahan Karet Remah (*Crumb Rubber*) dan dua fasilitas Pengolahan Karet Asap atau *Ribbed Smoked Sheet* (RSS), dan produk yang dihasilkan antara lain : RRS I, RRS II, RRS III, SIR 10 dan SIR 20.

Semua hasil produksi tersebut akan dijual ke pasar lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran, bersama seluruh BUMN Perkebunan (PTPN I s/d PTPN XIV) Perusahaan membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPM) PTPN I-XIV yang berkedudukan di Jakarta dan juga Indoham di Jerman.

Selain menjalankan kegiatan operasional perusahaan, Perusahaan juga memperhatikan keselarasan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Manajemen berkeyakinan bahwa eksistensi dan operasi perusahaan harus memberi manfaat bagi para *stakeholdernya*. Tanggung jawab perusahaan tersebut dapat diwujudkan melalui Bina Lingkungan, Proyek Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), Petani Plasma, Proyek Siak, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keselamatan Kerja, Manajemen Mutu, Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun, serta PUKK atau kemitraan.

Secara administratif, wilayah kerja perusahaan terletak di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Sejarah singkat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V)

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya

Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL).

PKBL PT. Perkebunan Nusantara V berdomisili di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru – Riau, maksud dan tujuan didirikannya Unit PKBL adalah :

- a) Merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan pelaksanaan PKBL diharapkan hubungan dengan para stakeholders menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjaga.
- b) Untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- c) Untuk menciptakan hubungan antara PT. Perkebunan Nusantara V, dengan Dinas Koperasi & UKM saling menunjang didalam pelaksanaan penyaluran dana PUKK yang efektif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dilingkungan wilayah kerja Perusahaan serta terwujud ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari Perusahaan.

- d) Membantu masyarakat setempat yang berlokasi disekitar Perusahaan.
- e) Perbaiki SDM masyarakat disekitar Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

1. Kegiatan Utama

Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di Propinsi Riau, PT. Perkebunan Nusantara V dalam menjalankan kegiatan usahanya juga melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan kegiatan utamanya :

Program Kemitraan adalah membantu pembinaan usaha swasta dan koperasi berskala kecil melalui penyaluran pinjaman dana dan penyaluran dana Pembinaan dari Program Kemitraan.

Program Bina Lingkungan yang kegiatan utamanya adalah membantu meningkatkan SDM disamping sektor lainnya yaitu : bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan korban bencana alam dan bantuan pelestarian alam.

a) Penyaluran Pinjaman

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyaluran pinjaman adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan dan Evaluasi Proposal

Calon Mitra Binaan harus mengajukan proposal kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur apabila ingin mendapat pinjaman Program Kemitraan untuk mengembangkan usahanya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proposal calon mitra binaan, antara lain:

1. Nama dan alamat unit usaha
2. Nama dan alamat pemilik atau pengurus unit usaha
3. Bukti identitas diri pemilik atau pengurus
4. Bidang usaha
5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang minimal RT atau RW
6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan atau beban, dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha)
7. Rencana usaha dan kebutuhan dana

Dalam menyalurkan dana pinjaman, BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur tidak hanya bertindak pasif menunggu proposal dari calon mitra binaan, akan tetapi BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur

dapat melakukan tindakan aktif melalui survey ke sentra-sentra usaha kecil, pendekatan kepada koperasi, kelompok tani, dan usaha-usaha kecil lainnya.

b. Penyaluran pinjaman

Apabila proposal tersebut telah disetujui, kemudian unit PKBL menyalurkan pinjaman kepada mitra binaan. Penyaluran pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu surat perjanjian atau kontrak yang memuat antara lain :

1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan.
2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan.
3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya.
4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
5. Monitoring, Penagihan Pinjaman dan Penyelesaian Bermasalah-Mitra Binaan

Setelah pinjaman disalurkan, maka BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur memonitor pemenuhan kewajiban mitra binaan. Pihak BUMN Pembina atau BUMN

Penyalur atau Lembaga Penyalur memberi tenggang waktu kepada mitra binaan selama 3 bulan pertama peminjaman untuk tidak membayar pinjamannya. Setelah 3 bulan pertama, maka pembayaran pinjaman mulai dihitung dengan bunga sebesar 6 %. Selain itu, Pinjaman dana Program Kemitraan akan dinilai kualitasnya berdasarkan ketepatan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasi mitra binaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lancar

Pembayaran pinjaman tepat waktu atau selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

b. Kurang Lancar

Apabila keterlambatan pembayaran angsuran melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama.

c. Diragukan

Apabila keterlambatan pembayaran angsuran telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh

tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama.

d. Macet

Apabila keterlambatan pembayaran angsuran telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

b) *Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan*

Dana Pembinaan Kemitraan disalurkan melalui Program Kemitraan yang ditujukan kepada mitra binaan yang telah dan masih terdaftar dalam Program Kemitraan. Dana Pembinaan Kemitraan tersebut disalurkan beberapa program yang disusun untuk membantu mitra binaan dalam rangka mengembangkan usahanya, meliputi: program pendidikan, program pelatihan, program pemagangan, program pemasaran, program promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan program Kemitraan.

c) *Penyaluran Bantuan Melalui Program Bina Lingkungan(BL)*

Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk :

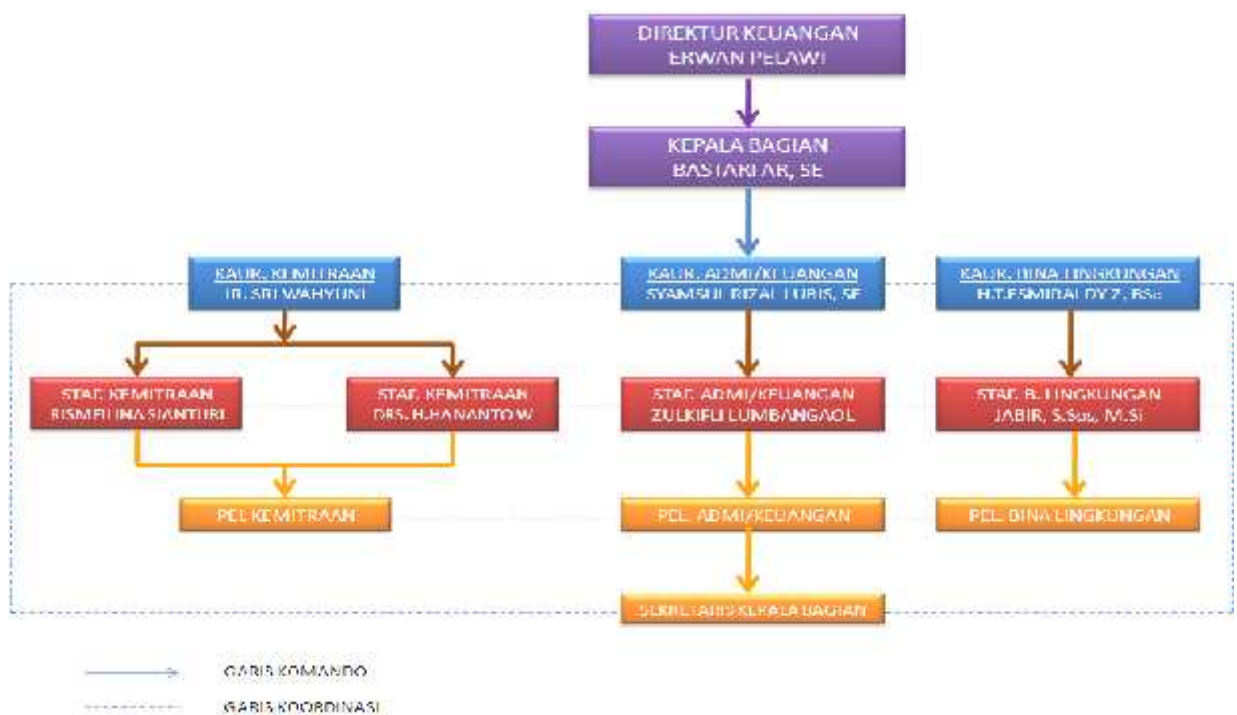
- a. Bantuan korban bencana alam
- b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan

- c. Bantuan peningkatan kesehatan
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan atau sarana umum
- e. Bantuan sarana ibadah
- f. Bantuan pelestarian alam

2. Susunan Pengurus

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) dilaksanakan oleh suatu unit setingkat Kepala Bagian, yaitu Bagian PUKK dan Bina Lingkungan. Susunan organisasi PKBL PTPN V : Direktur Keuangan, Kepala Bagian, Kepala Urusan, Staf Urusan dan Karyawan Pelaksana.

Gambar 1.2



Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara V

3. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyajian laporan keuangan PKBL adalah berdasarkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan Meneg BUMN nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Untuk itu, unit PKBL mempunyai sebuah buku pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan khusus dari Kementerian Negara BUMN, yaitu berjudul “Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”. Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) serta *auditable*.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Usaha Kecil

Dewasa ini secara umum diakui bahwa usaha kecil dan menengah mampu memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Sedangkan kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum 250 juta untuk membiayai usaha produktif. **(Susilo,2000:82)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1995 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Milik warga negara Indonesia
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

4. Berbentuk usaha perseorangan.

Jenis usaha yang mempunyai kriteria diatas, oleh Bank Indonesia dikelompokkan sebagai kegiatan usaha yang perlu dibantu dengan Kredit Usaha Kecil (KUK).

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil adalah usaha yang dikelola perorangan yang mempunyai aset paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) belum termasuk tanah dan bangunan, dan bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan manapun.

2. Pengertian Sistem

Beberapa ahli akuntan memberikan pendapat yang berbeda mengenai sistem, untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian sistem. Menurut pendapat **Mulyadi** pengertian sistem adalah :

Sistem terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk saling mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk saling menangani sesuatu yang berulang kali atau yang rutin terjadi (**Mulyadi, 2001:2**)

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah merupakan suatu alat yang terdiri dari suatu prosedur-prosedur berupa satu kesatuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan utama perusahaan.

3. Pengertian Kredit.

Istilah kredit bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang jual beli barang dengan kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan dengan tunai tetapi dengan cara mengangsur.

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *cedere* yang artinya adalah kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur), dimana kreditur percaya bahwa si penerima kredit (debitur) di masa akan datang dapat memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan (Thomas dan Chalik, 2003. 12).

Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti akan kembali.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Susilo, 2000:70).

Menurut Luman Dendawijaya pengertian kredit adalah:

“ kredit adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati ”.

(Dendawijaya,2002,82)

Kredit menurut **Kasmir** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. **(Kasmir, 2008:73)**

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, kemudian adanya kesepakatan antara sipeminjam dengan yang dipinjamkan sesuai perjanjian yang telah dibuat. Baik dalam jangka waktu pengembalian maupun dalam penetapan bunga yang telah disepakati bersama.

4. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh pihak kreditur didasarkan atas rasa kepercayaan. Dengan begitu pemberian krdit berarti bahwa pihak kreditur dalam memberikan kredit harus betul-betul yakin kalau pihak debitur dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Adapun unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa barang, uang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan yang diberikan oleh kreditur terlebih dahulu dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang debitur.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Mencakup masalah masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya bencana alam.

e. Balas jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut dikenal dengan nama bunga. **(Kasmir, 2008:75).**

Sedangkan menurut **Rivai (2006:5)** unsur-unsur kredit adalah:

- a. Adanya dua pihak yaitu pemberi kredit (*kreditur*) dan penerima kredit (*debitur*)
- b. Adanya kepercayaan antara penerima kredit dan pemberi kredit
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- e. Adanya unsur waktu, kredit dapat ada karena adanya unsur waktu baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit.
- f. Adanya unsur resiko. Resiko dari pihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar, karena kegagalan usaha dan lainnya. Resiko dari penerima kredit adalah kecurangan dari pihak kreditur.
- g. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam memberikan kredit. Jadi pihak kreditur dalam memberikan kredit kepada pihak debitur harus benar-benar yakin dan percaya bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kredit yang diberikan tentu saja mengandung resiko akan pengembaliannya, semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula beban bunga yang dikenakan terhadapnya. Oleh

karena itu maka sebaiknya jangan menggunakan jangka waktu yang terlalu panjang pada kredit. Karena semakin panjang rentang waktu yang diberikan maka semakin besar kemungkinan terjadinya kredit macet.

5. Tujuan Kredit

Perkreditan melibatkan beberapa pihak, yaitu : kreditur (pemberi kredit), debitur (penerima kredit), otorita moneter dan bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan utama perkreditan berbeda-beda tergantung pada pihak-pihak tersebut. Tujuan utama dari pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kreditur

- 1) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatan
- 2) Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan
- 3) Perkreditan merupakan instrumen penjaga *likuiditas*, *solvabilitas* dan *profitabilitas* bank

b. Bagi Debitur

- 1) Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan kinerja (*performance*) usaha semakin baik dari sebelumnya.
- 2) Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.

- 3) Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

c. Bagi Otorita

- 1) Kredit berfungsi sebagai instrumen moneter
- 2) Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan negara.
- 3) Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisien dan mengurangi pemborosan disemua lini.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Kredit dapat menimbulkan *backward* dan *foreward linkage* dalam kehidupan perekonomian
- 2) Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
- 3) Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli.

Menurut **Kasmir (2006:105)**, tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administratif kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah akan semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Sedangkan menurut **Rivai (2006:6)**, tujuan kredit adalah:

- a. *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar nasabah.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitasi yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.

Dari berbagai tujuan kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit sangat berguna dilihat dari berbagai pihak. Pemberian kredit dapat meningkatkan usaha para pengusaha, pemeratakan pendapatan masyarakat, mendapatkan peluang modal dan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian nasional.

6. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian modern, bank memegang peranan penting dalam hal pemberian kredit, karena organisasi di bank mempunyai usaha pokok memberikan atau menyediakan fasilitas kredit kepada para pengusaha atau masyarakat yang sangat membutuhkan. Kredit yang diberikan oleh pihak bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya dibidang perekonomian. Adapun fungsi kredit menurut **Kasmir** adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan

sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- d. Meningkatkan pengedaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya, seperti membuka warung atau menyewakan rumah kontrak atau jasa lainnya.

h. Untuk meningkatkan hubungan International.

Dalam hal pinjaman international akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya. **(Kasmir,2006,108)**

7. Jenis-jenis Kredit

Bila dilihat dari berbagai pandangan, kredit terdiri dari beberapa jenis. Dalam hal ini macam atau jenis kredit tidak bisa dipisahkan dari peraturan perkreditan yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan berkembangnya waktu saat ini, maka berkembang pula unsur-unsur yang

menjadi landasan kredit. Sehingga berkembang menjadi berbagai macam jenis kredit. Menurut **Kasmir (2008:76)** jenis-jenis kredit dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria, yaitu:

1. *Dilihat dari segi kegunaan*

a) kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata, masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. *Dilihat dari segi tujuan kredit*

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit barang tambang akan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contohnya, seperti kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini adalah kredit ekspor dan impor.

3. *Dilihat dari segi jangka waktu*

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contohnya adalah kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. *Dilihat dari segi jaminan*

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. *Dilihat dari segi sektor usaha*

a) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit peternakan

Dalam hal ini jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c) Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d) Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e) Kredit profesi

Diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

f) Dan sektor-sektor lainnya.

8. **Jaminan Kredit**

Fungsi jaminan sendiri adalah untuk melindungi bank dari kerugian dan meminimalkan resiko kredit. Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai:

1. Dengan jaminan

a) Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin-mesin atau peralatan
5. Barang dagangan
6. Tanaman, kebun atau sawah
7. Dan lainnya

b) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:

1. Sertifikat saham
2. Sertifikat obligasi
3. Sertifikat tanah
4. Sertifikat deposito
5. Rekening tabungan yang dibekukan
6. Rekening giro yang dibekukan
7. Promes
8. Wesel
9. Dan surat tagihan lainnya.

c) Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank, maka apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

d) Jaminan asuransi

Yaitu bank yang menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama kepada fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya.

2. *Tanpa jaminan*

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi.(Kasmir,2008,81).

9. **Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut **Mulyadi(2001:31)** yang dimaksud prosedur adalah: urutan kredikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Sedangkan menurut **Kasmir(2008:98)** prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal

Dalam pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan tentang:

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus, berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya
- b. Tujuan pengambilan kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lain.
- e. Jaminan kredit, kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat, selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
 - 1) Akte pendirian perusahaan
 - 2) Bukti Diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) para pengurus dan pemohon
 - 3) T.D.P.(Tanda daftar perusahaan)
 - 4) N.P.W.P.(Nomor pokok wajib pajak)
 - 5) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
 - 6) Photo copy sertifikat yang dijadikan jaminan

7) Daftar penghasilan bagi perseorangan

8) Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Menyelidiki dokumen yang diajukan pemohon kredit apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Adapun aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Aspek hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek teknis atau oprasi
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek ekonomi sosial
- g. Aspek AMDAL(Analisis dampak lingkungan terhadap darat, ait,dan udara sekitarnya)

4. Wawancara Pertama

Merupakan tahap penyidikan kepada calon peminjam dengan berhadapan langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap dengan yang diinginkan.

5. Peninjauan Ke Lokasi (*on the spot*)

Tujuan peninjauan lokasi adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis di proposal

6. Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah *on the spot* di lapangan.

7. Keputusan Kredit

Menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit mencakup:

- a. Akad kredit yang akan ditandatangani
- b. Jumlah uang yang akan diterima
- c. Jangka waktu kredit
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar

8. Penandatanganan Akad Kredit

Dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris

9. Realisasi Kredit

Yaitu pengambilan dana sebagai realisasi dari pemberian kredit yang diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, dan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

10. Penyaluran atau penarikan Dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

10. Analisis Kredit

Sebelum memberikan keputusan persetujuan pemberian kredit (pinjaman), maka pihak kreditur sebagai pemilik modal melakukan pengumpulan informasi tentang data-data peninjaunya. Tindakan pengumpulan data atau analisis kredit ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pemberian pinjaman yang dilakukan.

Analisis penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai sesuatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur bahwa usaha yang akan dibiayai cukup layak **(Dendawijaya, 2001: 91)**

Analisis kredit adalah proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap terdiri dari beberapa faktor, diantaranya peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi usaha serta kelancaran pembayaran kredit. **(Arthesa, 2006:170)**

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya

dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan) dan *profitable* (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu. **(Rivai,2006:287)**

Menurut Suyatno dkk yang dimaksud dengan analisis kredit adalah:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah **(Suyatno dkk, 2003: 70)**

Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko (*degree of risk*) tertentu. Untuk menghindari hal tersebut pihak kreditur harus melakukan analisis kredit (kualitatif dan kuantitatif) atas data perusahaan yang meminta kredit. Menurut **Kasmir(2008:91)** prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P, yaitu:

5 C kredit adalah sebagai berikut:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial

standingnya. Ini semua merupakan ukuran ”kemauan” debitur membayar kreditnya.

2. *Capacity*

Melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan

3. *Capital*

Mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Colleteral*

Mengenai jaminan yang diberikan oleh debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition*

Menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa datang sesuai sektor masing-masing

Sedangkan penilaian kredit dengan 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Perpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Mengenai bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolennya.

6. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan baik berupa jaminan barang, orang atau asuransi.

B. Tinjauan Praktek

1. Jenis Pinjaman Dana

Berdasarkan Peraturan Meneg BUMN No. : PER-05/MBU/2007, BUMN adalah salah satu institusi pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diluar Bank, Departemen Teknis, dan Asosiasi Usaha Sejenis untuk membantu menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah di sekitar wilayah usahanya. PT. Perkebunan Nusantara V merupakan salah satu dari 29 (dua puluh sembilan) BUMN yang memberikan bantuan permodalan kepada Usaha Kecil dan Menengah yang berasal dari:

1. Penyisihan laba setelah pajak BUMN Pembina 1-2%.
2. Jasa administrasi pinjaman atau margin atau bagi hasil, bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan.
3. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
4. Penyaluran dana dari BUMN Pembina lain.

a) Jenis Pinjaman Dana

1) Pinjaman untuk modal kerja

Yaitu pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan berupa pinjaman modal usaha yang bisa digunakan mitra untuk memperbesar usahanya.

Pinjaman ini diberikan pada sektor :

i. Agribisnis, yang termasuk sektor agribisnis, yaitu:

- a. Pertanian
- b. Perkebunan
- c. Peternakan
- d. Perikanan

ii. Non agribisnis, yang termasuk sektor non agribisnis, yaitu:

- a. Industri
- b. Perdagangan
- c. Jasa.

2) Pinjaman Dana Khusus

Yaitu pinjaman khusus di sektor perdagangan dan jasa yang digunakan untuk pembelian aktiva produktif oleh mitra yang berasal dari ke dua sektor tersebut.

b) Keperluan

Keperluan pinjaman harus disesuaikan dengan kebutuhan dari si peminjam, yaitu apakah pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal kerja atau untuk kredit khusus yaitu untuk pembelian aktiva produktif.

c) Jangka Waktu

Jangka waktu berdasarkan ketentuan pihak perusahaan, paling lama 3 (tiga) tahun untuk pinjaman modal kerja dan 2 (dua) tahun untuk pinjaman khusus. Jenis angsuran dari pembayaran pinjaman itu sendiri dibayar setiap bulan dengan masa tenggang waktu pembayaran selama 3 (tiga) bulan.

d) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman ditentukan oleh perusahaan yaitu sebesar 6% per tahun.

e) Jaminan pinjaman

Jaminan pinjaman yang di syatkan dalam peminjaman dana yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V tidaklah memberatkan, karena tujuannya hanya untuk mengikat mitra saja. Jaminannya adalah:

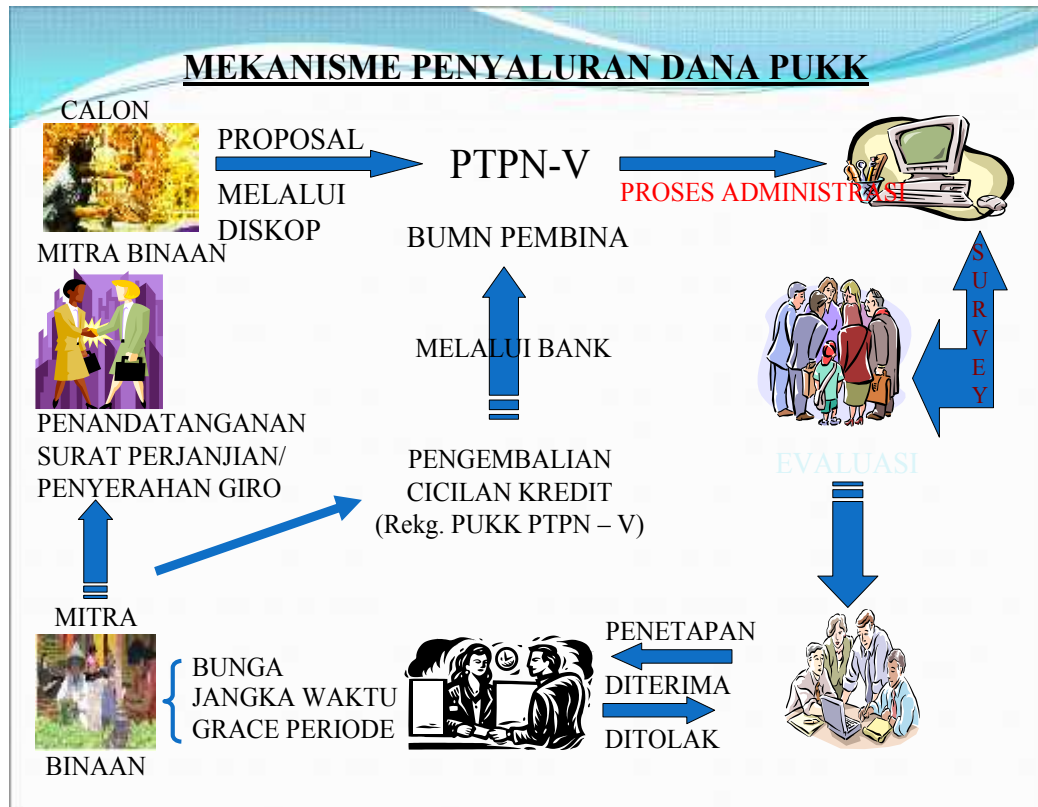
1. Surat keterangan dari kelurahan bahwa mitra binaan benar-benar mempunyai usaha seperti yang dikatakannya,
2. Surat BPKB motor mitra binaan,
3. SKGR mitra binaan.

2. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Pinjaman

Pada PT. Perkebunan Nusantara V khususnya di bagian PKBL prosedur dan syarat pemberian pinjamannya adalah sebagai berikut:

a) Prosedur

Gambar 1.3



sumber data : PT. Perkebunan Nusantara V

keterangan gambar mekanisme:

1. Bagi mitra yang ingin melakukan pinjaman ke PKBL PT. Perkebunan Nusantara V cukup memasukkan proposal pinjaman yang telah memenuhi persyaratan pinjaman, langsung diantar ke PT. Perkebunan Nusantara V atau melalui DISKOP (Dinas Koprasi) setempat.
2. Proposal yang masuk kemudian diagendakan ke bagian Direktur Keuangan untuk mendapatkan kontrak kerja lalu direkap. Proses ini disebut proses administrasi.

3. Melakukan survey langsung lapangan yang dilakukan oleh anggota PKBL PT. Perkebunan Nusantara V.
4. Mengevaluasi proposal yang masuk setelah dilakukannya survey ke lapangan. Yang akan digunakan untuk mengambil keputusan proposal mana yang layak untuk diberikan pinjaman.
5. Pemilihan proposal yang diterima untuk diberikan pinjaman dan yang ditolak.
6. Tanda tangan kontrak dengan calon mitra binaan. Kemudian membuat berita acara.
7. Penyerahan giro ke masing-masing rekening mitra binaan.

b) Persyaratan

- 1) Kegiatan usaha minimal sudah berjalan satu tahun dan milik sendiri.
- 2) Omset penjualan per tahun maksimal satu milyar.
- 3) Asset usaha diluar tanah dan bangunan maksimal Rp. 200.000.000.
- 4) Usaha legal dan milik WNI (Warga Negara Indonesia).
- 5) Nama dan alamat unit usaha.
- 6) Nama dan alamat pemilik atau pengurus unit usaha.
- 7) Bukti identitas diri pemilik atau pengurus berupa :
 - a. KTP (Kartu Tanda Penduduk),
 - b. KK (Kartu Keluarga),
 - c. Pas photo.
- 8) Bidang usaha yang dilakukan.
- 9) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang .

10) Perkembangan kinerja usaha, berupa:

- a. arus kas,
- b. perhitungan pendapatan dan beban,
- c. neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha.(per tahun terakhir untuk KUD dan 3 bulan terakhir untuk UKM)

11) Rencana usaha dan kebutuhan dana.

12) Photocopy Rekg Tabungan (saldo tabungan minimal satu juta rupiah).

13) Agunan atau jaminan.

14) Denah lokasi tempat usaha dan tempat tinggal.

15) Rekening Listrik.

16) Nomor yang dapat dihubungi dan nomor Telp. Saudara terdekat.

17) Surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman Kemitraan dari BUMN lain.

3. Analisis Pinjaman

Analisis pinjaman yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V khususnya bagian PKBL menggunakan perkiraan *cashflow* dari mitra yang akan diberikan pinjaman dan menggunakan 5C yaitu:

a) Perkiraan *Cashflow* Mitra Binaan (CMB)

Yaitu dengan cara memperkirakan total pendapatannya yang telah dikurangi biaya-biaya hidupnya untuk mendapatkan sisa keuangannya yang akan digunakan mitra tersebut dalam membayar cicilan pinjaman.

Contoh:

Pak Budi memiliki usaha kedai kelontong dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan pengeluaran perbulannya Rp. 100.000,-. Biaya hidup Pak Budi sekeluarga setiap bulan Rp. 100.000,- ditambah biaya listrik dan anak-anak sebesar Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,-. Maka jumlah pinjaman yang akan dipinjamkan kepada Pak Budi adalah sebesar?

Jawab:

CMB

Pendapatan	Rp. 1.000.000,-
Pengeluaran usaha	Rp. 100.000,-
Pengeluaran sehari-hari	Rp. 100.000,-
Biaya listrik	Rp. 20.000,-
Biaya anak-anak	<u>Rp. 50.000,-</u>
Sisa uang	Rp. 730.000,-

Maka pinjaman yang akan diberikan pihak perusahaan kepada Pak Budi adalah yang mempunyai cicilan dibawah dari sisa uang yang dimiliki Pak Budi setelah dikurangi biaya-biaya. Seperti cicilan dari Rp. 15 juta hingga Rp. 18 juta. Karena jumlah cicilan tersebut dianggap sesuai dengan keuangan calon mitra binaan. Sebagai asumsi pemberian pinjaman dapat dilihat sebagai berikut:

I. Pinjaman Rp. 15.000.000,- maka cicilan setiap bulannya:

$$\frac{\text{Rp. 15.000.000,-} + (\text{Rp. 15.000.000} \times 6\% \times 3 \text{ tahun})}{36 \text{ bulan}} = \text{Rp. 491.666,667}$$

36 bulan

$$\text{Atau} = \text{Rp. 492.000,-}$$

Jika perusahaan memberikan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- hingga Rp. 18.000.000,- maka cicilannya setiap bulan tidak lebih dari Rp. 600.000,- jadi Pak Budi masih bisa menabung sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,-. Dan seandainya Pak Budi mengalami kemunduran pada pendapatannya, dia masih sanggup membayar cicilan pinjamannya.

II. Pinjaman Rp. 20.000.000 maka cicilan setiap bulannya:

$$\frac{\text{Rp. 20.000.000,-} + (\text{Rp. 20.000.000,-} \times 6\% \times 3 \text{ tahun})}{36 \text{ bulan}} = \text{Rp. 655.555,556}$$

36 bulan

$$\text{Atau} = \text{Rp. 660.000,-}$$

Jika perusahaan memberikan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- maka uang yang bisa ditabung oleh Pak Budi adalah:

Sisa uang Rp. 730.000,-

Cicilan Rp. 660.000,-

Sisa Rp. 70.000,-

Pak Budi hanya bisa menabung sebesar Rp. 70.000,- dan apabila usaha Pak Budi mengalami kemunduran yang mengakibatkan pendapatannya juga menurun maka Pak Budi tidak bisa membayar cicilan pinjaman.

Sedangkan analisis dengan menggunakan 5C adalah sebagai berikut:

1. Character

Perusahaan melihat bagaimana karakter calon mitra binaannya dengan melihat bagaimana mitra binaan tersebut membayar cicilan pinjaman sebelumnya.

2. Capacity

Perusahaan menilai seberapa kemampuan mitra membayar angsuran pinjaman dari pendapatan usahanya yang telah dikurangi biaya hidupnya.

3. Capital

Perusahaan mengetahui dari mana uang yang digunakan perusahaan untuk membayar cicilan pinjaman. Apakah dari usaha yang dijalankannya atau dari lain-lainnya.

4. Colleteral

Perusahaan menekankan untuk melampirkan jaminan sesuai dengan jumlah pinjaman mitra binaan untuk mengikat mitra agar membayar cicilan pinjaman.

5. Condition

Perusahaan menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa datang sesuai sektor masing-masing mitra binaan.

4. Pinjaman Bermasalah

Resiko yang sering dihadapi perusahaan dalam memberikan pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pinjaman macet dikarenakan mitra melakukan pelunasan pembayaran pada saat jaminan akan di ambil atau pada saat jatuh tempo akhir dari pembayaran cicilan pinjaman.
- b) Adanya itikad kurang baik dari mitra binaan itu sendiri.
- c) Adanya sebagian dari mitra binaan tersebut menganggap bahwa bantuan pinjaman modal kerja itu adalah hibah dan tidak ditagih lagi.
- d) Adanya setoran tidak jelas identitas yang di sebabkan oleh tidak samanya nama orang yang membayar setoran cicilan ke Bank dengan mitra binaan yang meminjam dana

Upaya penyelesaian permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi mitra binaan yang dikategorikan macet serta melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha mitra binaan bersama-sama dengan Kantor Dinas Koperasi UKM setempat.
- b. Melakukan pembinaan dengan cara pelatihan dan pendidikan untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran para mitra binaan untuk mengembalikan atau mencicil hutangnya.
- c. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh mengenai mitra binaan yang macet, maka dilakukan langkah-langkah yaitu:
 - 1) Membuat surat pernyataan kepada mitra binaan, yang bertujuan untuk memotivasi mitra binaan yang ditandatangani oleh mitra binaan bersangkutan dan Instansi terkait.

- 2) Kunjungan langsung ke lokasi usaha mitra binaan, mencari penyebab terjadinya kemacetan pengembalian, serta memberi solusi jalan keluarnya.
 - 3) Melaksanakan penagihan langsung kepada mitra binaan yang bersangkutan dan memberikan penyuluhan bahwa pinjaman yang diberikan bukan hibah yang diberikan kepada mereka.
- d. Untuk mengurangi setoran tidak jelas identitasnya, penulis mencoba menyumbang saran kepada Bagian PUKK & BL, dimana setiap membuat surat perjanjian tentang jumlah besar angsuran per bulannya agar dibedakan sedikit, misal besar pinjaman Rp.15.000.000,- angsuran per bulan untuk si A sebesar Rp. 492.000,- dan si B sebesar Rp. 492.100,- dst.

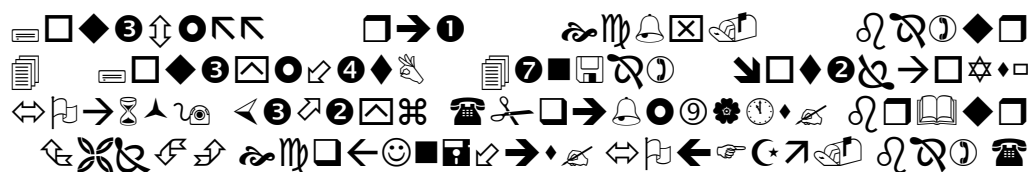
5. Pinjaman Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, manusia wajib untuk berusaha agar ia mendapat rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat banyak. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Untuk memenuhi usaha diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Ada kalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran

institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha. Dalam Islam pinjaman tidak disebut pinjaman namun disebut pembiayaan (*financing*) dengan metode bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan memberikan fasilitas penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan modal. Perbedaannya dalam Islam tidak mengenal bunga tetapi bagi hasil. Bagi hasil disini adalah jika untung maka membagi keuntungan dan jika rugi maka membagi kerugian, sehingga kedua belah pihak merasa adil dalam bermuamalah. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pembiayaan:

Surah Al-Baqarah ayat 280:



Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui"*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita harus saling menolong, pada prinsipnya perbankan membantu para nasabah dalam menyediakan permodalan untuk mengembangkan usaha sehingga membantu meningkatkan perekonomiannya, namun akan menimbulkan perjanjian yang harus disepakati kedua belah pihak apapun risikonya. Dalam bank Islam keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sebagai wujud keindahan tolong-menolong yang berdasarkan Islam.

Surat Al-Baqarah ayat 282:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

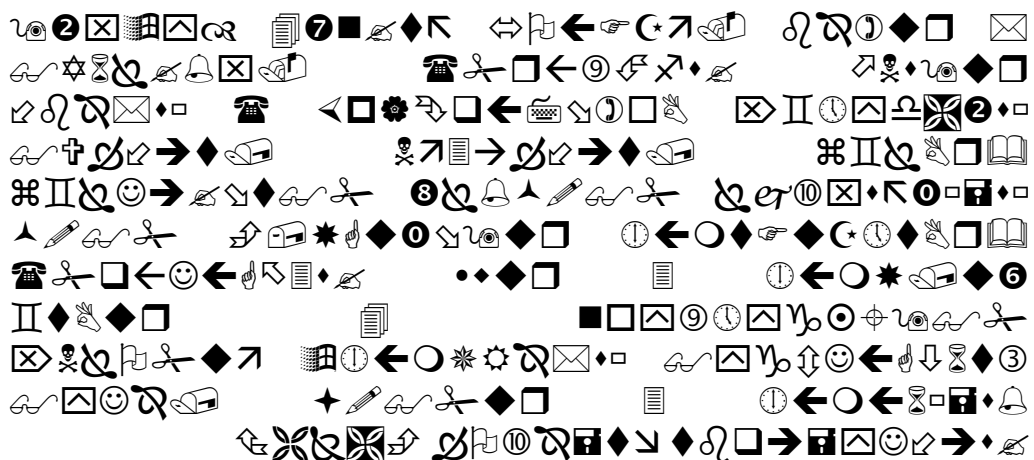


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ket: ¹Bermuamalah ialah seperti menjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Surat Al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang¹ (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ket: ¹barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Ayat diatas lebih jelas menerangkan bahwa boleh bermuamalah tidak secara tunai, namun dilakukan pencatatan dan hendaklah memberikan jaminan. Namun jika saling percaya hendaklah ditunaikan hutangnya bagi yang dipercayai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan analisa masalah yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan secara umum yaitu:

1. Program kemitraan diadakan untuk masyarakat yang memiliki usaha namun secara teknis perbankan ia belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman (belum *bankable*) sehingga persyaratan dalam peminjaman dana tidaklah terlalu memberatkan mitra.
2. Prosedur dan persyaratan yang ditetapkan PT Perkebunan Nusantara V dianggap telah sesuai dengan teori yang ada. Suku bunga yang ditetapkan oleh PT Perkebunan Nusantara V juga tidak memberatkan mitra. Karena hanya merupakan balas jasa pinjaman saja.
3. Analisis pinjaman dana yang dilakukan dengan menggunakan CMB (*Cashflow* Mitra Binaan) dan juga tak lepas dari prinsip 5C, yaitu : *character, capacity, capital, colleteral*, dan *condition* yang diterapkan guna memperkecil kemungkinan terjadinya pengembalian pinjaman bermasalah.
4. Dalam pemberian pinjaman kepada mitra tanggung jawab terpenting adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pemberian pinjaman yang sehat. Dilihat dari kenyataan yang ada dalam melaksanakan pemberian pinjaman, berbagai masalah yang timbul adalah

terjadinya kemacetan dalam pengembalian cicilan pinjaman serta jangka waktu yang tidak sesuai dengan pelunasan pinjaman.

B. SARAN

1. Menilai calon mitra binaan secara signifikan dan spesifik dengan menganalisisnya terlebih dahulu dengan menggunakan, CMB, 5C, dan 7P dalam melakukan pemberian pinjaman terutama menilai pada *character* mitra tersebut sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pengembalian pinjaman yang macet yang dikarenakan itikad mitra yang kurang baik.
2. Perlunya penyuluhan kepada mitra bahwa pinjaman yang diberikan bukan merupakan dana yang dihibahkan oleh pemerintah kepada mereka.
3. Sebaiknya untuk menghindari mitra yang selalu memberikan alasan-alasan untuk menghindari pembayaran pinjaman diberlakukan denda tambahan pada pembayaran cicilan dan untuk mitra yang membayar pinjaman pada saat jatuh agunan atau jaminan yang dimiliki mitra akan diambil (pada saat jatuh tempo pembayaran cicilan telah selesai).
4. Prosedur dan persyaratannya apabila ada yang terlalu memberatkan mitra binaan, sebaiknya dlonggarkan agar dapat memudahkan mitra binaan mengikuti prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan pinjaman dana.
5. Diharapkan agar PT Perkebunan Nusantara V lebih aktif dalam mensosialisasikan program kemitraan kepada masyarakat sehingga dapat

diketahui dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena program ini baik untuk membantu usaha kecil dalam meningkatkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade, Ir. MM, dkk, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta
- Dendawijaya, Lukman, 2001. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Hasibuan, Malayu, S P, 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo. Jakarta
- _____, 2008, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga. Cetakan ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Rivai, Veithsal, 2006, *Credit Management Handbook*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Susilo, Sri. Y, dkk, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cetakan pertama, Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Thomas, Suyatno. Drs, Chalik, A.H. Drs, Sukada, Made. Drs. Akt. MA, 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT. SUN. Jakarta
- Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN*. Kementrian BUMN. Jakarta

DAFTAR TABEL

Table 1.1	15
-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	17
Gambar 1.2	31
Gambar 1.3	61